



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,  
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DIREKTORAT SEKOLAH MENENGAH ATAS  
2020



Modul Pembelajaran SMA

# SEJARAH INDONESIA



KELAS  
**XII**



**INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN  
SAMPAI MASA DEMOKRASI LIBERAL**

**SEJARAH INDONESIA KELAS XII**

**PENYUSUN**

**NANSY RAHMAN, S.Pd, M.Pd**  
**SMA NEGERI 1 LIMBOTO**

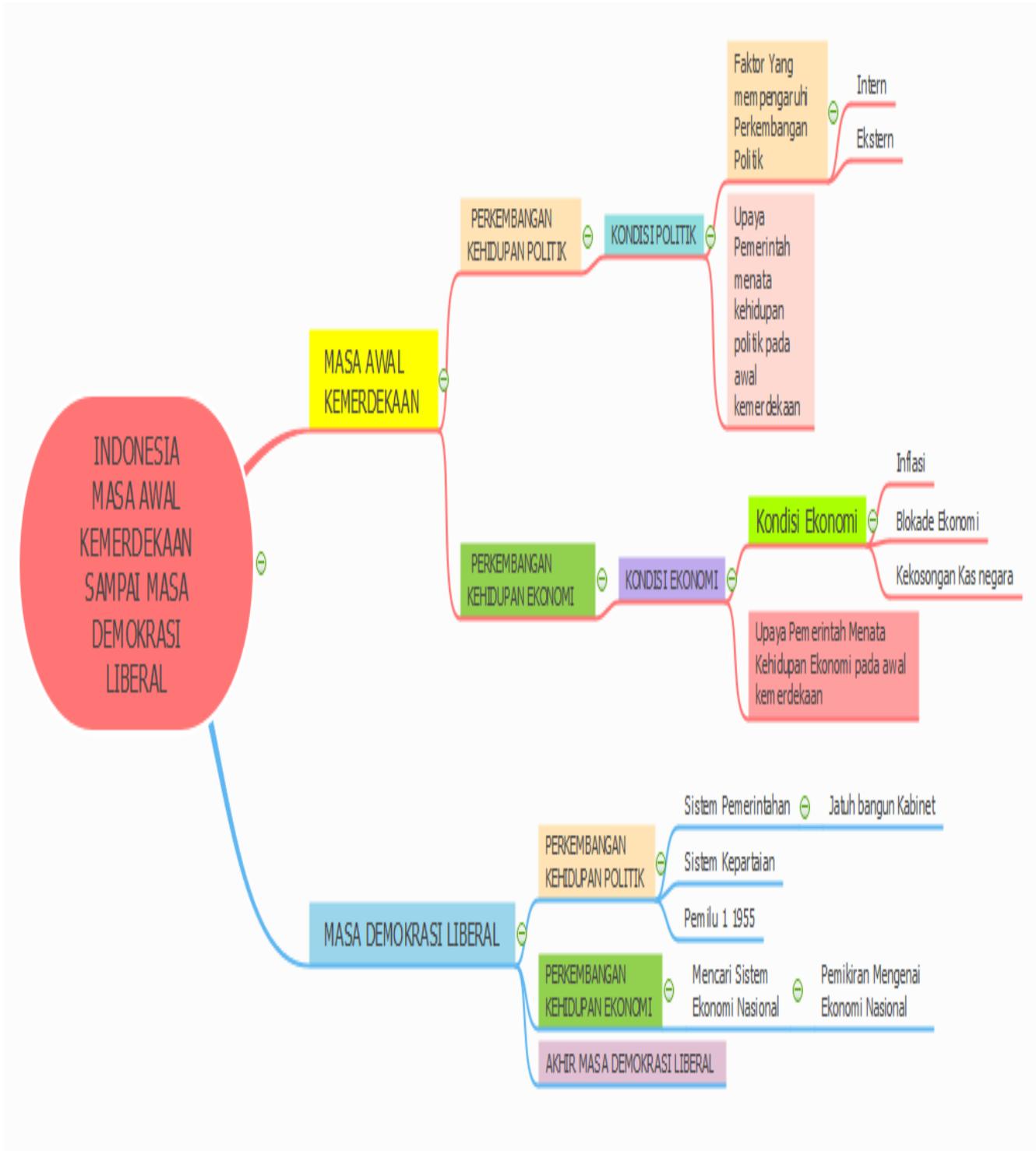
## DAFTAR ISI

PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
GLOSARIUM.....	iv
PETA KONSEP.....	v
PENDAHULUAN.....	1
A. Identitas Modul.....	1
B. Kompetensi Dasar.....	1
C. Deskripsi Singkat Materi.....	1
D. Petunjuk Penggunaan Modul.....	2
E. Materi Pembelajaran.....	3
KEGIATAN PEMBELAJARAN 1.....	4
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN.....	4
A. Tujuan Pembelajaran.....	4
B. Uraian Materi.....	4
1. Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan.....	4
2. Perkembangan Kehidupan Politik bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan.....	6
3. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan.....	11
C. Rangkuman.....	17
D. Penugasan Mandiri.....	18
E. Latihan Soal.....	19
F. Penilaian Diri.....	21
PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL.....	23
A. Tujuan Pembelajaran.....	23
B. Uraian Materi.....	23
1. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal.....	23
2. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal.....	35
C. Rangkuman.....	39
D. Penugasan Mandiri.....	39
E. Latihan Soal.....	40
F. Penilaian Diri.....	46
EVALUASI.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	54

## GLOSARIUM

Agresi	: Serangan terhadap suatu pihak
AMB	: Agresi Militer Belanda yaitu serangan atau operasi militer yang dilancarkan oleh Belanda terhadap Indonesia
Blokade	: Pengepungan (penutupan) suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga orang-orang, barang, kapal dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Atau usaha untuk mencegah persediaan, pasukan, informasi atau bantuan mencapai tempat pasukan musuh.
Blokade Ekonomi	: pengepungan (penutupan) sistem ekonomi pada suatu daerah, kawasan, tempat atau negara sehingga berbagai macam kegiatan ekonomi tersebut dapat berlangsung dengan bebas untuk kepentingan militer dalam peperangan melawan musuh.
Civil Affairs Agreement	: Persetujuan antara pemerintah kerajaan Inggris dan kerajaan Belanda, yang menyetujui bahwa panglima tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Untuk hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan sipil, pelaksanaannya diselenggarakan oleh NICA dibawah tanggung jawab komando Inggris. Pada tahap berikutnya kekuasaan itu akan dikembalikan kepada kerajaan Belanda.
Demokrasi	: Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.
Dekrit	: Titah adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum.
Diplomasi	: Praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.
Ekonomi	: berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.
Inflasi	: Proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu atau suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor
Konferensi	: rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Konstituante	: Sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi
Konstitusi	: Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.
Liberal	: Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
Militer	: Angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata.

## PETA KONSEP



## PENDAHULUAN

### A. Identitas Modul

Mata Pelajaran	: Sejarah Indonesia
Kelas	: XII
Alokasi Waktu	: 2 x 2 JP (2 Pertemuan)
Judul Modul	: Indonesia Masa Awal Kemerdekaan Sampai Masa Demokrasi Liberal

### B. Kompetensi Dasar

- 3.3 Menganalisis Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal
- 4.3 Merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa Demokrasi Liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis

### C. Deskripsi Singkat Materi

Apakah kabar siswa-siswi hebat calon pemimpin masa depan? Masih semangat untuk belajar Sejarah Indonesia? Kalian pasti sudah tahu bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tahukah kalian bahwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan titik akhir perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan? Setelah merdeka banyak permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Seperti apa ya kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal? Bagaimana para pendiri bangsa atau pemerintah menata kehidupan politik dan ekonomi negara Indonesia yang baru berdiri, apalagi pada awal kemerdekaan Indonesia masih harus menghadapi kekuatan asing yang ingin menjajah kembali Indonesia. Bagaimana kehidupan bangsa Indonesia setelah bangsa asing khususnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sampai memasuki masa demokrasi liberal?

Dengan belajar melalui modul ini, kalian bisa menambah wawasan dan melihat bagaimana perjalanan sejarah Indonesia setelah kita memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu dari awal kemerdekaan Indonesia sampai pada masa demokrasi liberal dalam kurun waktu (1945 - 1959), kalian akan mengetahui kondisi kehidupan politik dan ekonomi dan upaya pemerintah Indonesia dalam menata kehidupan politik dan ekonomi negara Indonesia saat itu.

Modul ini akan sangat bermanfaat bagi kalian sebagai generasi penerus bangsa calon pemimpin masa depan yang nanti diharapkan dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kalian dapat belajar dari sejarah bagaimana bangsa Indonesia belajar berdemokrasi pada masa awalnya dan bisa mengambil hikmah di tengah kehidupan demokratis yang kita jalani saat ini. Begitu pula dengan sistem ekonomi nasional yang diberlakukan. Penerapan kebijakan di bidang ekonomi dalam suasana demokratis dari awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi liberal tentu dapat menjadi pembelajaran yang positif bagi kalian dalam membangun Indonesia lebih baik.

Penasaran seperti apa perjalanan sejarah Indonesia pada masa ini? Yuk pelajari modul ini lebih lanjut untuk melihat suasana dan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan (1945 - 1950) sampai pada masa Demokrasi Liberal yang berlangsung dari (1950-1959).

## D. Petunjuk Penggunaan Modul



Supaya pembelajaran bermakna maka yang perlu kalian lakukan adalah :

1. Pastikan kalian mengerti dan memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran.
2. Mulailah dengan mencermati peta konsep pada modul ini yang memuat konsep-konsep dari materi pembelajaran untuk membantu kalian menghubungkan konsep-konsep yang ada selama kalian belajar.
3. Pelajari dan pahami setiap materi yang diuraikan dalam modul ini untuk memudahkan kalian mengerjakan latihan soal dan evaluasi dengan hasil yang maksimal.
4. Jika ada kata-kata yang tidak dipahami, kalian dapat mencermati glosarium sebagai gambaran makna katanya.
5. Kerjakan soal latihan yang diberikan pada setiap akhir kegiatan pembelajaran 1 dan 2 dan evaluasi yang diberikan setelah mempelajari modul ini secara keseluruhan untuk mengukur kemampuan kalian dengan jujur dan percaya diri.
6. Jika sudah mengerjakan soal latihan, cobalah buka kunci jawaban yang ada pada bagian akhir dari setiap kegiatan pembelajaran dalam modul ini. Cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang ada. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100 \%$$

Tingkat Penguasaan:	
90 -100	= Baik Sekali
80 – 89	= Baik
70 – 79	= Cukup
< 70	= Kurang

Ket :

- Setiap jawaban yang benar dari setiap soal yang kalian kerjakan diberikan skor 1.
  - Untuk mengetahui berapa nilai dan tingkat penguasaan kalian terhadap materi yang telah kalian pelajari setiap akhir kegiatan pembelajaran, hitunglah jawaban kalian yang benar dan bagikan dengan jumlah soal yang dikerjakan.
7. Apabila nilaimu mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Bagus. Kalian dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran 2.
  8. Jika masih dibawah 80 % kalian harus mengulangi materi kegiatan belajar 1 terutama pada bagian yang belum dikuasai.
  9. Jangan lupa lakukan penilaian diri sebagai sarana refleksi atas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Isi jawaban kalian dengan jujur, gunakan tanda centang (✓) pada kolom yang disediakan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya.

## E. Materi Pembelajaran

Modul ini terbagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran dan di dalamnya terdapat uraian materi, contoh soal, soal latihan dan soal evaluasi.

Pertama : Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Awal Kemerdekaan

Kedua : Kehidupan Politik dan Ekonomi Bangsa Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal



Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum dapat sepenuhnya merasakan kemerdekaan. Apalagi dengan kembalinya Belanda ke Indonesia bersama dengan pasukan sekutu yang juga berada pada kesatuan Netherlands Indische Civil Administration (NICA). Di periode-periode awal kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa. Seperti yang diketahui, berpindah dari status Negara yang terjajah jadi negara yang merdeka pastinya bukan hal yang gampang.

Setelah proklamasi kemerdekaan para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Usaha usaha yang ditempuh yaitu dengan mengadakan rapat PPKI pada tanggal 18, 19 dan 22 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang yaitu mengesahkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk membantu presiden.

Seperti apa perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan sampai pada masa demokrasi liberal? Untuk selanjutnya akan kalian pelajari dalam modul ini. Bagaimana? pasti kalian sudah tak sabar untuk mengetahui perjalanan sejarah Indonesia yang kita cintai ini.

Pelajari terus modul ini dengan semangat 45.



Selamat belajar dan Tetap Semangat!

# KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

## PERKEMBANGAN KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA PADA MASA AWAL KEMERDEKAAN

### A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian mampu menganalisis kehidupan Politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan cermat dan penuh semangat serta dapat menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab dan Cinta tanah air.

### B. Uraian Materi

#### 1. Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu. Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan.

Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu. Ketidakstabilan itu disebabkan oleh faktor faktor sebagai berikut :

- 1) Faktor Internal (dari dalam), antara lain :
  - Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.
  - Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa



- Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi
- perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.

## 2) Faktor Eksternal

- Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.



Sumber : <https://www.zenius.net/prologmateri/sejarah/a/1593/Pertempuran-dalam-Upaya-Perjuangan-Militer-Mempertahankan-Kemerdekaan-Indonesia>

- Jepang memiliki status masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.



Sumber: <https://tirto.id/cara-jepang-semboyan-kekalahannya-perang-di-depan-rakyat-indonesia-dVgA>

Seperti apa ya kondisi kehidupan Politik pada awal kemerdekaan dan bagaimana pemerintah menyikapi semua itu? Yuk pelajari terus modul ini ya.

## 2. Perkembangan Kehidupan Politik bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemimpin bangsa Indonesia terus berjuang membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan dan dinamika perjuangan bergerak sangat cepat. Indonesia memang telah merdeka tetapi untuk dapat menjalankan organisasi kenegaraan memerlukan perjuangan dan pengorbanan. Dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan dapat kita lihat

### a. *Terbentuknya Negara Indonesia*

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno memimpin Sidang PPKI untuk pertamakalinya yang menghasilkan 3 keputusan penting yaitu mengesahkan UUD 1945, Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Membentuk Komite Nasional Indonesia. Dengan demikian Indonesia telah memenuhi syarat untuk menjadi suatu negara.

### b. *Pembentukan Alat Kelengkapan Negara dan pemerintahan*

- 1) Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen)
- 2) Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah
- 3) Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
- 4) Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah

### c. *Pembentukan Provinsi di Seluruh Wilayah Indonesia*

Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan

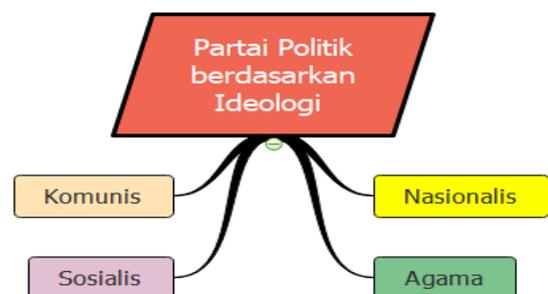
### d. *Perubahan Fungsi KNIP*

Dalam Persidangan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) di Jakarta tanggal 16 Oktober 1945, Sutan Sjahrir diminta duduk sebagai Ketua Badan Pekerja KNIP. Sebagian besar anggota KNIP mengusulkan perubahan fungsi KNIP dari hanya sebagai pembantu presiden menjadi lembaga legislatif. Hal itu didukung Moh. Hatta yang menerbitkan Maklumat Presiden tanggal 16 Oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislatif kepada KNIP. Bersama Presiden, KNIP juga ditetapkan ikut menetapkan Garis Garis Besar Hakuan Negara.

### e. *Perkembangan Keragaman Ideologi dan Partai Politik*

Salah satu keputusan sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah dibentuknya Partai Nasional Indonesia (PNI) Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan dan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Pembentukan partai tunggal dengan menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu satunya partai politik di Indonesia,

menimbulkan kritikan dan reaksi keras dari berbagai pihak karena menimbulkan kesan adanya partai tunggal. Dalam hal pembinaan kehidupan yang demokratis, BP KNIP mengusulkan perlu dibentuknya partai partai politik. Setelah pembatalan partai tunggal, pemerintah merealisasikan pembentukan partai partai politik di Indonesia dengan dikeluarkannya maklumat No. X yang isinya antara lain



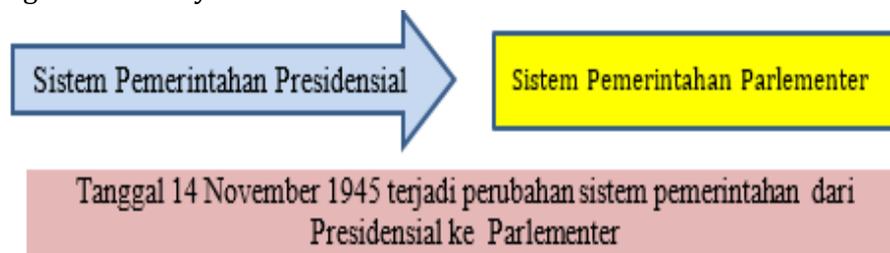
pemerintah memberi kesempatan pendirian partai politik dan ditandatangani oleh wakil presiden Drs. Moh. Hatta pada tanggal 3 November 1945. Dengan dikeluarkannya maklumat No. X itu menunjukkan bahwa negara RI yang baru berdiri itu adalah merupakan sebuah negara Demokrasi. Setelah keluar maklumat pemerintah tersebut, selanjutnya bermunculan partai-partai dengan berbagai latar belakang dan ideologi.

Perlu kalian ketahui bahwa sistem multi partai di Indonesia diawali dengan maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, setelah mempertimbangkan usulan dari Badan Pekerja. Pemerintah pada awal pendirian partai-partai politik menyatakan bahwa pembentukan partai-partai politik dan organisasi politik bertujuan untuk memperkuat perjuangan revolusi. Maklumat itu kemudian memunculkan partai-partai baru.

#### **f. Perubahan Sistem Presidensial ke Parleментар**

Negara Indonesia telah terbentuk, Alat kelengkapan negara dan lembaga pemerintahan daerahpun telah terbentuk. Namun permasalahan bangsa Indonesia belum selesai. Para pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia.

Sjahrir kemudian mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri. Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menteri. Dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parleментар yang diawali dengan Kabinet Syahrir.



#### **g. Perpindahan Ibu Kota Negara**

Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946.



Pemilihan kota Yogyakarta sebagai ibu kota dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Terdapat markas besar tentara
  - 2) Di Yogyakarta tidak dijumpai kekuatan sekutu sehingga siapapun leluasa menunjukkan dan menyebarluaskan pernyataan kemerdekaan.
  - 3) Terdapat lascar Hisbullah Sabilillah dan Laskar Mataram Pimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
  - 4) Yogyakarta mampu menjamin pelaksanaan perjuangan, baik secara diplomasi maupun dengan bersenjata.
  - 5) Letak Yogyakarta dekat dengan Semarang dan Surakarta. Jika ada suatu ancaman, kekuatan kedua kota tersebut dapat digerakkan.
- Presiden Soekarno dan Moh. Hatta bersama dengan beberapa menteri pindah ke Yogyakarta, sementara perdana menteri Sutan Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan dunia internasional.

#### ***h. Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan.***

Perjuangan bangsa Indonesia setelah Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang berusaha untuk kembali ke Wilayah RI. Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA (Belanda) menimbulkan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih satu tahun Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah kemudian diserahkan kepada Belanda berdasarkan kesepakatan dalam Civil Affair Agreement. Untuk mendapatkan kembali daerah-daerah yang diduduki, Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

- 1) Perundingan Linggajati
- 2) Menghadapi Agresi Militer Belanda I
- 3) Perundingan Renville
- 4) Menghadapi Agresi Militer Belanda II
- 5) Perundingan Room Roijen
- 6) Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB
- 7) Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB)

Tahukan kalian, pada Agresi Militer Belanda II, para pemimpin bangsa ditawan oleh Belanda, meskipun demikian perjuangan terus berlanjut. Sebelum ditangkap Belanda, Presiden RI, Ir. Soekarno memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat di Sumatera Barat yang selanjutnya dikenal dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI.



**Konferensi Meja Bundar (KMB)** dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag (Belanda). KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia diantaranya perundingan Linggajati,

perjanjian Renville, juga perjanjian Roem-Roijen. Dalam rangka mempercepat penyerahan kedaulatan, pemerintah Indonesia yang kala itu diasingkan di Bangka, bersedia mengikuti KMB. Pada tanggal 2 November 1949, persetujuan KMB berhasil ditandatangani.



Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki>

Pada akhir Desember 1949, Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) , Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Naskah pengakuan kedaulatan ditanda tangani di dua tempat yaitu di negeri Belanda dan di Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen. Sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta.

Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.



Penandatanganan ini menegaskan kedaulatan Indonesia. Bentuk negara Indonesia pun berubah menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat (RIS).

### ***i. Berdirinya Republik Indonesia Serikat***

Republik Indonesia (RIS) lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa. Pembentukan negara-negara bagian yang disebut sebagai negara-negara boneka sebenarnya hanyalah siasat Belanda untuk menghancurkan kembali Republik Indonesia, namun negara-negara boneka yang pada awalnya dibentuk untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia justru berbalik arah dan menginginkan Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali ke NKRI.

#### 7 negara bagian RIS:

1. Negara Republik Indonesia (RI)
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Pasundan (distrik federal Jakarta)
4. Negara Jawa Timur
5. Negara Madura
6. Negara Sumatra Timur (NST)
7. Negara Sumatra Selatan (NSS).

#### 9 Satuan kenegaraan :

1. Jawa Tengah
2. Kalimantan Barat
3. Dayak Besar
4. Daerah Banjar
5. Kalimantan Tenggara
6. Kalimantan Timur
7. Bangka
8. Belitung
9. Riau

### ***j. Pembubaran RIS dan Kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)***

Pada Januari 1950 munculah gagasan untuk pembubaran RIS dan hal tersebut disikapi positif oleh negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sayangnya untuk kembali ke NKRI tidak semudah membalikan telapak tangan, pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) beserta parlemen-parlemen yang ada didalamnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk membubarkannya karena untuk merubah bentuk sebuah negara memerlukan undang-undang dan tidak bertentangan dengan bentuk negara sebelumnya yaitu Republik Indonesia Serikat (RIS). Maka dari itu dibentuklah sebuah Rancangan Undang-undang (RUU) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Serikat (RIS) tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi uu darurat nomor 11 tahun 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).



Presiden Soekarno menyampaikan pidato kenegaraan pada peringatan 5 tahun kemerdekaan RI di halaman Istana Merdeka pada 17 Agustus 1950. (Arsip KOMPAS)

Setelah terbentuknya UU darurat, hampir semua negara-negara bagian yang dipelopori oleh Negara Madura dan Negara Jawa Timur telah bergabung ke Republik Indonesia kecuali bagian barat dan sumatra timur. Walaupun pada awalnya dua negara tersebut menolak untuk bergabung kembali ke Republik Indonesia namun pada akhirnya bergabung kembali atas usaha pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengajak kedua negara bagian tersebut bergabung kembali ke NKRI dengan pemberian mandat

oleh Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur kepada Moehammad Hatta untuk membentuk NKRI.

Pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) berlanjut diawalinya konferensi bersama antara pemerintah Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia dan Negara Indonesia Timur yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1950 untuk pertama kalinya.

- Kemudian konferensi kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 1950 yang menyetujui bahwa pembubaran Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konferensi kedua tersebut tidak hanya menghasilkan keputusan setuju atas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tapi juga membentuk panitia pembentuk Undang-undang Negara Kesatuan atau kita kenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia.

### Tahukan Kalian ?



**Pada tanggal 15 Agustus 1950, setelah melalui berbagai proses, dilakukan pengesahan UUS RIS yang bersifat sementara sehingga dikenal dengan UUD'S 1950. UUD S ini disahkan oleh presiden RIS terdiri dari campuran UUD 45 dan UUD RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).**

#### ***k. Politik Luar Negeri***

Pada awal kemerdekaan, politik luar negeri Indonesia difokuskan pada bagaimana memperoleh pengakuan dari negara lain atas kemerdekaannya. Kemudian mencetuskan politik **BEBAS AKTIF**.

### **3. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Awal Kemerdekaan**

#### ***a. Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan***

Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena :

- Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
- Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang mantap.
- Kehidupan ekonomi saat pendudukan Jepang memang sudah buruk akibat pengeluaran pembiayaan perang Jepang membuat pemerintah baru Indonesia agak sulit untuk bangkit dari keterpurukan.
- Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet, dimana hal tersebut mendukung ketidakstabilan ekonomi.
- Politik keuangan yang berlaku di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional.
- Belanda masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.

**b. Faktor-faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .**

**1. Terjadi Inflasi yang sangat tinggi**

Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :

- Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
- Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar.
- Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Inflasi terjadi karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang dan beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh sekutu sementara RI belum memiliki mata uang sendiri, di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

- Mata uang *De Javasche Bank*
- Mata uang pemerintah Hindia Belanda
- Mata uang pendudukan Jepang



Keadaan tersebut diperparah dengan diberlakukannya uang NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Upaya sekutu tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran kesepakatan yaitu bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai

status Indonesia, maka tidak ada mata uang baru. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai pengganti uang Jepang.

## 2. Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

- Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.
- Mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.
- Mencegah / melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabkan:

- Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.
- Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.
- Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.
- Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah:

- Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan
- Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.
- Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda



## 3. Kekosongan Kas Negara

Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

### C. Upaya Pemerintah mengatasi masalah Ekonomi

#### 1. Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (Nica)

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut :

##### a) Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga sangat rendah. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar

negeri sehingga pemerintah berani memperkirakan bahwa pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

Sebagai imbalannya pemerintah India bersedia mengirimkan bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia pada saat itu. Saat itu Indonesia tidak memikirkan harga karena yang penting adalah dukungan dari negara lain yang sangat diperlukan dalam perjuangan diplomatik dalam forum internasional. Adapun *keuntungan politis* yang diperoleh Indonesia dengan adanya kerjasama dengan India ini adalah Indonesia mendapatkan dukungan aktif dari India secara diplomatik atas perjuangan Indonesia di forum internasional.

#### b) Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain :

Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (*Banking and Trading Corporation*) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Pelaksanaan ini dibantu oleh Angkatan laut RI serta pemerintah daerah penghasil barang-barang ekspor. Karena perairan di Sumatra sangatlah luas, maka pihak Belanda tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama *Indonesian Office (Indoff)*. Secara resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu juga berperan sebagai perantara dengan pedagang Singapura dan mengusahakan pengadaan kapal-kapal yang diperlukan.

Dibentuk perwakilan kementerian pertahanan di luar negeri yaitu Kementerian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

## 2. Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan sejak Februari 1946, adalah sebagai berikut.

### a) Konferensi Ekonomi Februari 1946

Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah

ekonomi yang mendesak, seperti : Masalah produksi dan distribusi makanan. Tercapai kesepakatan bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi.

**Masalah sandang :** Disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi kesengsaraan rakyat Indonesia. Badan ini dipimpin oleh Sudarsono dibawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik (Bulog). Sementara itu tujuan dibentuk Bulog (Februari 1946) untuk melarang pengiriman bahan makanan antar karisidenan

**Status dan Administrasi perkebunan-perkebunan :**

Keputusannya adalah semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah kementerian Kemakmuran. Sehingga diharapkan pendapatan negara dapat bertambah secara signifikan dengan nasionalisasi pabrik gula dan perkebunan tebu.

Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

**b) Pinjaman Nasional**

Program ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan (Surachman) dengan persetujuan BP-KNIP. Untuk mendukung program tersebut maka dibuat *Bank Tabungan Pos*, bank ini berguna untuk penyaluran pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan jangka waktu pengembalian selama 40 tahun. Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI.

Rakyat dapat meminjam jika rakyat mau menyetor uang ke Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Usaha ini mendapat respon yang besar dari rakyat terbukti dengan besar pinjaman yang ditawarkan pada bulan Juli 1946 sebesar Rp. 1.000.000.000,00, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,00. Kesuksesan yang dicapai menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada Pemerintah RI.

**c) Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.**

Badan ini dibentuk atas usul dari menteri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Inti rencana ini adalah agar Indonesia membuka diri terhadap penanaman modal asing dan melakukan pinjaman baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Untuk membiayai rencana pembangunan ekonomi tersebut pemerintah membuka diri terhadap penanaman modal asing, mengerahkan dana masyarakat melalui pinjaman nasional, melalui tabungan masyarakat, serta melibatkan badan-badan swasta dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk menampung dana tersebut dibentuk Bank Pembangunan. Perusahaan patungan (merger) diperkenankan berdiri sementara itu tanah partikelir dihapuskan.

Perkembangannya April 1947 badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Rencana tersebut belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan, yaitu Agresi Militer Belanda I dan Perjanjian Linggarjati yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda dan yang tersisa sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat (Sumatera dan Jawa). Hal tersebut ditambah dengan adanya Pemberontakan PKI dan Agresi militer Belanda II yang mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

#### **d) Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948**

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah angkatan perang dikurangi secara drastis untuk mengurangi beban negara di bidang ekonomi dan meningkatkan efisiensi angkatan perang dengan menyalurkan para bekas prajurit pada bidang-bidang produktif dan diurus oleh kementerian Pembangunan dan Pemuda. Rasionalisasi yang diusulkan oleh Mohammad Hatta diikuti dengan intensifikasi pertanian, penanaman bibit unggul, dan peningkatan peternakan.

#### **e) Rencana Kasimo (Kasimo Plan)**

Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga tahun (1948-1950) mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana Kasimo ini adalah :

- Menanami tanah kosong (tidak terurus) di Sumatera Timur seluas 281.277 HA
- Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan.
- Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
- Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun.

#### **f) Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)**

Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk :

- Menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta, agar pengusaha swasta memperkuat persatuan dan mengembangkan perekonomian nasional.
- Menggalang dan Melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Meskipun usaha PTE didukung pemerintah dan melibatkan dukungan dari pemerintah daerah namun perkembangannya PTE tidak dapat berjalan baik dan hanya mampu didirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp. 5.000.000,00. Kegiatan ini semakin mengalami kemunduran akibat Agresi Militer Belanda. Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah *Banking and Trading Corporation* (Perseroan Bank dan Perdagangan). Mengaktifkan kembali Gabungan Perusahaan Perindustrian dan Perusahaan Penting, Pusat Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (GASIDA) dalam rangka memperbaiki ekonomi Indonesia.

#### **g) Oeang Republik Indonesia (ORI)**

UU



Sumber: <https://tirto.id/duel-mata-uang-republik-vs-mata-uang-nica-czdN>

Melarang digunakan mata uang NICA dan yang lainnya serta hanya boleh menggunakan Oeang Repoeblk Indonesia (ORI) dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan No. 17 tahun 1946 yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1946. Mengenai pertukaran uang Rupiah Jepang diatur berdasarkan UU No. 19 tahun 1946 tanggal 25 Oktober 1946.

Tanggal 25 Oktober selanjutnya dijadikan sebagai hari keuangan. Adapun kebijakan penyetaraan mata uang adalah sebagai berikut.

- Di Jawa, Lima puluh rupiah (Rp. 50,00) uang Jepang disamakan dengan satu rupiah (Rp. 100,00) ORI dengan perbandingan 1:5.
- Di Luar Jawa dan Madura, Seratus rupiah (Rp. 100,00) uang Jepang sama dengan satu rupiah (Rp. 1,00) ORI dengan perbandingan 1:10.
- Setiap sepuluh rupiah (Rp. 10,00) ORI bernilai sama dengan emas murni seberat 5 gram.

Mengenai pengaturan nilai tukar uang ORI dengan valuta asing (nilai kurs mata uang ORI di pasar valuta asing) sebenarnya dipegang oleh Bank Negara yang sebelumnya telah dirintis bentuk prototipenya yaitu dengan pembentukan Bank Rakyat Indonesia (Shomin Ginko). Namun tugas tersebut pada akhirnya dijalankan oleh Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia 1946) yang dipimpin oleh Margono Djojohadikusumo. Bank ini merupakan bank umum milik pemerintah yang tujuan awal didirikannya adalah untuk melaksanakan koordinasi dalam pengurusan bidang ekonomi dan keuangan.

BNI didirikan pada 1 November 1946. Meskipun begitu usaha pemerintah untuk menjadikan ORI sebagai satu-satunya mata uang nasional tidak tercapai karena terpecah-pecahnya wilayah RI akibat perundingan Indonesia- Belanda. Sehingga di beberapa daerah mengeluarkan mata uang sendiri, yang berbeda dengan ORI, seperti URIPS (Uang Republik Propinsi Sumatera) di Sumatera, URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) di Aceh, URIDAB (Uang Republik Indonesia Banten) di Banten dan Palembang.

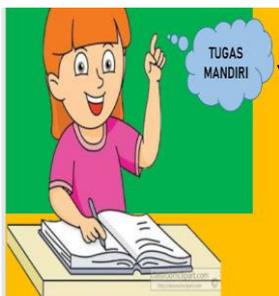
Upaya-upaya pemerintah Indonesia tersebut dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia meskipun Belanda masih belum pergi dari Indonesia.

Kalian sudah memahami kondisi kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Semoga apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan politik dan ekonomi bangsa Indonesia menginspirasi kalian jika nanti menjadi seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan kebijakan untuk membuat kehidupan Indonesia menjadi lebih baik.

### C. Rangkuman

1. Di periode-periode awal kemerdekaan, Indonesia mengalami sebuah masa transisi politik yang begitu luar biasa. Seperti yang diketahui, berpindah dari status Negara yang terjajah jadi Negara yang merdeka.
2. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan, terjadi ketegangan, kekacauan dan berbagai insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrokan dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta Sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama Sekutu dan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atas nama Belanda yang datang kembali ke Indonesia dengan memboncong Sekutu.
3. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil, banyak peristiwa yang terjadi yang membawa perubahan-perubahan dan mempengaruhi perkembangan negara pada masa awal kemerdekaan. Ketidakstabilan politik dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.
4. Pada masa awal kemerdekaan terjadi perubahan sistem pemerintahan dari Sistem presidensial menjadi sistem Parlementer.
5. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan dapat dikategorikan pada periode sebagai berikut:
  - 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949  
Terjadinya penyimpangan pada UUD 1945 untuk sistem pemerintahan dari Presidensial jadi Parlementer. Stabilitas politik di periode ini jadi bermasalah karena belum terdapat konstitusi yang mengikat.
  - 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950  
Terdapat penyimpangan dalam bentuk Negara kesatuan jadi Negara serikat. Akan tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan lama karena para pemimpin Indonesia kala itu menyadari kesalahan yang terjadi. Hingga kemudian pada akhirnya Indonesia kembali menjadi Negara berbentuk kesatuan. Akan tetapi keadaan Negara masih cukup labil.
6. Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Negara yang baru saja didirikan harus mewarisi kekacauan perekonomian yang teramat parah. Pemerintahan yang baru saja terbentuk belum didukung pejabat yang ahli dalam menangani masalah perekonomian.
7. Pada masa awal kemerdekaan, tingkat perekonomian Indonesia berada pada titik terendah karena peredaran mata uang yang tidak terkendali (hyperinflasi), adanya blokade ekonomi oleh Belanda dan kosongnya kas negara.
8. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil, pemerintah Indonesia telah berupaya dengan mengambil beberapa langkah dan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian pada awal kemerdekaan Indonesia.

#### D. Penugasan Mandiri



Untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari cari dan gali informasi tentang Pembentukan Pemerintah Darurat Indonesia (PDRI) dan Peranannya terhadap kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia pada awal kemerdekaan.

Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kalian dapat mencari referensi lain dari artikel, surat kabar, jurnal ataupun internet untuk menyelesaikan tugas ini.

## E. Latihan Soal

1. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyebab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali...
  - A. Pertentangan antar partai
  - B. Terjadinya bentrokan antar etnis
  - C. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali
  - D. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan
  - E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri
2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu...
  - A. Masyumi
  - B. PNI
  - C. PSI
  - D. PKI
  - E. NU
3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan...
  - A. Parlementer
  - B. Presidensial
  - C. Liberalisme
  - D. Terpimpin
  - E. Aristokrasi
4. Berdirinya partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan...
  - A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat
  - B. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia
  - C. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  - D. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang
  - E. permintaan dari Presiden Soekarno.
5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah...
  - A. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia
  - B. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis.
  - C. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan
  - D. Mempermudah perundingan dengan Belanda
  - E. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar
6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing. Pada saat ibukota

- dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk...
- A. menghadapi terror Belanda
  - B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat
  - C. mengadakan hubungan dengan luar negeri
  - D. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda
  - E. menciptakan pemerintahan tandingan
7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain...
- A. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian .
  - B. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia
  - C. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda
  - D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian
  - E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia
8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh...
- A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah
  - B. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali
  - C. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi
  - D. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah.
  - E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda
9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ...
- A. Menaikkan pajak dan bea Cukai
  - B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor
  - C. Mengisi kas pemerintah yang kosong
  - D. Mengedarkan uang secara besar besaran.
  - E. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI)
10. Salah satu penyebab kacaunya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ...
- A. Menyelenggarakan pinjaman Nasional
  - B. Menasionalisasi De Javasche Bank
  - C. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin
  - D. Mendevaluasi mata uang rupiah
  - E. Sistim ekonomi Gerakan Benteng

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No.	Kunci Jawaban	Pembahasan
1.	B	Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Hal ini disebabkan karena pada masa awal kemerdekaan, terjadi pertentangan antar partai, gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali, munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan dan munculnya gangguan keamanan dalam negeri.
2.	C	Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu PNI.
3.	A	Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan Parlemen.
4.	D	Berdirinya partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang.
5.	E	Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar.
6.	C	Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing. Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk mengadakan hubungan dengan luar negeri.
7.	C	Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain adanya Blokade ekonomi oleh Belanda.
8.	B	Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali.
9.	E	Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara mengeluarkan mata uang sendiri (ORI).
10.	A	Salah satu penyebab kacanya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ... Menyelenggarakan pinjaman Nasional.

## F. Penilaian Diri

Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN	
		Ya	Tidak
1	Saya sangat senang belajar sejarah mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.		
2	Saya mampu menjelaskan Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
3.	Saya mampu menjelaskan faktor factor yang mempengaruhi kondisi ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
4.	Saya mampu menganalisis mengapa terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan		
5.	Saya mampu menganalisis mengapa pada awal kemerdekaan banyak berdiri partai partai politik.		
6.	Saya mampu menjelaskan mengenai penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia		
7.	Saya mampu menganalisis latar belakang berdirinya RIS		
8.	Saya mampu menjelaskan pembubaran RIS dan kembali ke negara Kesatuan RI		
9	Saya mampu menjelaskan Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
10.	Saya mampu menganalisis factor factor penyebab ketidakstabilan perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan.		
11.	Saya mampu menguraikan langkah langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
12	Saya dapat menyelesaikan latihan/ tugas dengan semangat		
13	Banyak hal baru yang saya dapatkan dari mempelajari modul yang membahas mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan.		
14	Saya dapat mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan dalam menata kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

## KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

## **PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL**

### **A. Tujuan Pembelajaran**

Setelah kegiatan pembelajaran 2 ini diharapkan kalian mampu menganalisis kehidupan Politik dan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal dengan cermat dan penuh semangat serta dapat menunjukkan sikap peduli, tanggung jawab dan Cinta tanah air.

### **B. Uraian Materi**

Hallo siswa siswa hebat calon pemimpin masa depan. Bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya belajar sejarah. Pada pembelajaran kali ini kalian akan membahas mengenai Indonesia pada masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal adalah masa dimana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950. Masa ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Indonesia sebagai “negara baru” harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat.

Setelah berakhirnya pemerintahan RIS pada 1950, pemerintahan Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara.

Pada kurun waktu 1950 sampai 1959, kembali terjadi silih berganti kabinet. Kabinet jatuh bangun karena munculnya mosi tidak percaya dari partai lawan. Disamping itu, terjadi perdebatan dalam konstituante yang sering menimbulkan konflik berkepanjangan.

Seperti apa perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal? Yuk pelajari terus modul ini dengan penuh semangat.

### **1. Perkembangan Kehidupan Politik Masa Demokrasi Liberal**

Tahukah kalian, bahwa periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.

Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada Agustus 1950, RI kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan ke UUD sementara ini membawa Indonesia memasuki masa Demokrasi Liberal. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.

Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh banggunya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas

nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu. Pada era ini juga, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.

Terkait dengan pembahasan mengenai perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan Pelaksanaan Pemilu I tahun 1955

### **a. Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal**

Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai perdana menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.

Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945, sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD Sementara 1950. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah kerap kali terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering kali terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan diantara partai-partai yang ada. Perbedaan diantara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet. mulai Kabinet Natsir (Masyumi) 1950-1951; Kabinet Sukiman (Masyumi) 1951-1952; Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953; Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI) 1953-1955; Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956; Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI) 1956-1957 dan Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959.

Pada masa demokrasi liberal Pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu dewan menteri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen Presiden hanya sebagai lambang kesatuan.



### **Pelaksanaan Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal**

Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara

bergantian memegang hegemoni politik dalam empat kabinet yang pernah berlaku. Adapun susunan kabinetnya sebagai berikut;

### 1. Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)

**Formasi Kabinet Natsir.** Foto: Wikipedia

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini memiliki struktur yang terdiri dari tokoh – tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan



Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

#### **Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:**

- Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
- Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
- Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
- Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, kabinet Natsir mendapatkan tugas utama yaitu proses integrasi Irian Barat. Akan tetapi, Kabinet Natsir kemudian mendapatkan kendala yaitu pada masa kabinet ini terjadi banyak pemberontakan seperti: Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS).

Kabinet Natsir memiliki keberhasilan dalam upaya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Dalam bidang ekonomi kabinet ini memperkenalkan sistem ekonomi Gerakan Benteng yang direncanakan oleh Menteri Ekonomi, Sumitro Djojohadikusumo. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).

### 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur, namun gagal, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28 Maret-18 April 1951). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.



Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo.

**Formasi Kabinet Sukiman.** Foto: Pinterest

Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara.

RMS. dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat.

**Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah:**

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA).

MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.

Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno.

### 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

### Formasi Kabinet Wilopo. Foto: Wikipedia



Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Menteri Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI.

#### Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

##### 1. Program dalam negeri:

- a. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD
- b. Meningkatkan kemakmuran rakyat,
- c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan
- d. Pemulihan stabilitas keamanan negara

##### 2. Program luar negeri:

- a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda,
- b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta
- c. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam menjalankan tugasnya Kabinet Wilopo menghadapi krisis ekonomi, defisit kas negara, dan meningkatnya tensi gangguan keamanan yang disebabkan pergerakan gerakan separatis yang progresif. Ketimpangan Jawa dan luar Jawa membuat terjadi gelombang ketidakpuasan di daerah yang memperparah kondisi politik nasional.

Kabinet Wilopo juga harus menghadapi konflik 17 Oktober 1952 yang menempatkan TNI sebagai alat sipil dan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam usahanya memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan

Munculnya **Peristiwa Tanjung Morawa** mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli), Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar yang di dukung PKI mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

#### 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955)



**Kabinet Ali Sastroamijoyo I**

Kabinet Ali Sastroamidjojo yang terbentuk pada 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama Masa Demokrasi Liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di Parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama (NU). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR).

**Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I:**

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran
2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera
3. Pembebasan Irian Barat secepatnya
4. Pelaksanaan politik bebas-aktif
5. Peninjauan kembali persetujuan KMB.
6. Penyelesaian pertikaian politik.

Dalam menjalankan fungsinya, kabinet ini berhasil melakukan suatu prestasi yaitu:

- Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan 29 September 1955
  - Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955
- Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 memiliki pengaruh dan arti penting bagi solidaritas dan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia - Afrika dan juga membawa akibat yang lain, seperti :
- Berkurangnya ketegangan dunia
- ✓ Australia dan Amerika mulai berusaha menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya.
  - ✓ Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia-Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB

Pada masa pemerintahan kabinet Ali Sastroamidjojo I, Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadi Suryo memperkenalkan sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-baba diperuntukan menggalang kerjasama ekonomi antara pengusaha pribumi yang diidentikkan dengan Ali dan pengusaha Tionghoa yang diidentikkan dengan Baba.

Kabinet Ali ini juga sama seperti kabinet terdahulu mengalami permasalahan mengatasi pemberontakan di daerah seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Terjadinya Peristiwa 27 Juni 1955, yaitu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD memperburuk usaha peningkatan keamanan negara. Pada masa kabinet ini keadaan ekonomi masih belum teratasi karena maraknya korupsi dan peningkatan inflasi.

Konflik PNI dan NU memperburuk koalisi partai pendukung Kabinet Ali yang mengakibatkan NU menarik menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keretakan partai pendukung mendorong Kabinet Ali Sastro I harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

## 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi.

**Sumpah Jabatan PM Burhanuddin Harahap.** Foto: Pinterest



**Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:**

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Kabinet Burhanuddin Harap ini mencatatkan sejumlah keberhasilan dalam menjalankan fungsinya, seperti:

- ✓ Keberhasilan menyelenggarakan Pemilu pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember untuk memilih Dewan Konstituante.
- ✓ Membubarkan Uni Indonesia-Belanda
- ✓ Menjalin hubungan yang harmonis dengan Angkatan Darat
- ✓ Bersama dengan Polisi Militer melakukan penangkapan para pejabat tinggi yang terlibat korupsi

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 menghasilkan 4 partai besar di Parlemen yaitu, PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Pemilu itu diikuti oleh 27 dari 70 partai yang lolos seleksi. Selesai pelaksanaan Pemilu maka Burhanuddin Harahap menyerahkan jabatannya kepada Prseiden Sukarno

## 6. Kabinet Ali Sastramajoyo II (20 Maret 1956 - 4 Maret 1957)



Gambar : Formasi kabinet Ali sastro Amijoyo II

Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastramajoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet.

Program pokok dari Kabinet Ali Sastramajoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut:

1. Perjuangan pengembalian Irian Barat
2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD.
3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai.
4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara.
5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.
6. Pembatalan KMB
7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif
8. Melaksanakan keputusan KAA.

Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari Parlemen dan Presiden Soekarno, sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Pada masa kabinet ini muncul gelombang anti Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer di Sumater dan Sulawesi.

Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

## 7. Kabinet Djuanda (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Gambar : foramsi Kabinet Djuanda

Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya.

**Program pokok dari Kabinet Djuanda** dikenal sebagai **Panca Karya** yaitu:

- Membentuk Dewan Nasional
- Normalisasi keadaan RI
- Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB
- Perjuangan pengembalian Irian Jaya
- Mempergiat/mempercepat proses Pembangunan

Presiden Soekarno juga pernah mengusulkan dibentuknya Dewan Nasional ini sebagai langkah awal demokrasi terpimpin.

Pada masa kabinet Juanda, terjadi pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk mengatasinya diadakanlah Musyawarah Nasional atau Munas di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56 tanggal 14 September 1957. Munas tersebut membahas beberapa hal, yaitu masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. Munas selanjutnya dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munap) pada bulan November 1957.

Tanggal 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini atau yang dikenal dengan peristiwa Cikini

Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Pasca Deklarasi Djuanda, perairan Indonesia bertambah luas sampai 12 mil yang sebelumnya hanya 3 mil. Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939)*. Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Perlu kalian ketahui bahwa pada masa Demokrasi Parlementer ini luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah, *Zeenen Maritieme Kringen Ordonantie*, 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa:

*"laut territorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah (laagwaterlijn) dari pada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan (grondgebeid) dari Indonesia."*

Berdasarkan pasal tersebut, Indonesia jelas merasa dirugikan, lebar laut 3 mil dirasakan tidak cukup menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan rakyat dan negara. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulau di Indonesia. Hal ini menyebabkan kapal-kapal asing bebas mengarungi lautan tersebut tanpa hambatan. Kondisi ini akan menyulitkan Indonesia dalam melakukan pengawasan wilayah Indonesia. Sebagai suatu negara yang berdaulat Indonesia berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia.

Melihat kondisi inilah kemudian pemerintahan Kabinet Djuanda mendeklarasikan hukum teritorial kelautan nusantara yang berbunyi:

*Segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari pada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari pada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/ mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. (Sumber: Hasjim Djalal, 2006)*



Sumber : Atlas Nasional Indonesia (Bakosurtanal, 2011)

Gambar 2.4 Wilayah Indonesia berdasarkan Deklarasi Juanda

Dari deklarasi tersebut dapat kita lihat bahwa faktor keamanan dan pertahanan merupakan aspek penting, bahkan dapat dikatakan merupakan salah satu sendi pokok kebijaksanaan pemerintah mengenai perairan Indonesia. Dikeluarkannya deklarasi ini membawa manfaat bagi Indonesia yaitu mampu menyatukan wilayah-wilayah Indonesia dan sumber daya alam dari laut bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Deklarasi tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Djuanda.

Deklarasi Djuanda mengandung konsep bahwa tanah air yang tidak lagi memandang laut sebagai alat pemisah dan pemecah bangsa, seperti pada masa kolonial, namun harus dipergunakan sebagai alat pemersatu bangsa dan wahana pembangunan nasional.

### ***b. Sistem Kepartaian***

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan.

Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita

dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin- pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan dari pada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah.

Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan.

Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.



### ***c. Pelaksanaan Pemilu I Tahun 1955***

Pemilu adalah sesuatu yang sangat urgent untuk sebuah negara. Apalagi Pemilu yang dilakukan pertama kali, pasti akan sangat berpengaruh dan tentunya dikenang selama perjalanan perkembangan sebuah negara. Pemilu sendiri adalah termasuk salah satu sarana untuk menjalankan mekanisme demokrasi yang bertujuan untuk membuat rakyat juga bisa merasakan kehidupan bernegara. Di Indonesia, pemilu pertama kali digelar



yaitu pada tahun 1955. **Pemilu 1955** merupakan Pemilu yang paling bersejarah di Indonesia, ada banyak hal yang membuat Pemilu 1955 begitu dikenang sampai sekarang.

Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan Konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum, yaitu kabinet Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante (badan pembuat Undang-undang Dasar) dilaksanakan pada 15 Desember 1955. Pada pemilu pertama ini 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara.

Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil mereka. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilihan umum 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa “pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi, rakyatlah yang menjadi hakim”. Penegasan ini dikeluarkan karena terdapat suara-suara yang meragukan terlaksananya pemilu sesuai dengan jadwal semula.

Dalam proses pemilihan umum 1955 terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya (kurang lebih 78 juta), angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. (Feith, 1999)

## 2. Perkembangan Kehidupan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal

### a. Mencari Sistem Ekonomi Nasional

#### 1) Pemikiran Ekonomi Nasional

Pemikiran ekonomi pada 1950an pada umumnya merupakan upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Upaya membangkitkan perekonomian sudah dimulai sejak kabinet pertama di era demokrasi parlementer, Kabinet Natsir.

Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojohadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, karena pengusaha pribumi pada umumnya bermodal lemah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil.

Gagasan Soemitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud penancangan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang sering disebut juga dengan Plan Soemitro. Wujud dari RUP tersebut kemudian dicanangkan Program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi, serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain tujuan tersebut, juga untuk menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik.

Sayangnya dalam pelaksanaan muncul masalah karena dalam pelaksanaan Program Benteng, pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewiraswastaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Kondisi ini terjadi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik. Akibatnya, pengusaha-pengusaha yang masuk dalam Program Benteng lamban menjadi dewasa, bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimilikinya kepada pengusaha impor yang sesungguhnya, yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan Politik Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi, pada kenyataannya yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerja sama

tersebut dikenal sebagai perusahaan "Ali-Baba". Ali mewakili Pribumi dan Baba mewakili warga keturunan Cina.

Usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pengusaha pribumi dilakukan melalui "Gerakan Asaat". Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan Cina pada khususnya.

Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

Pemerintah, selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin.



Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka, Deppen, 1975

Gambar 2.6 Contoh Mata Uang yang digunting

Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana lima tahun, 1956-1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional (BPN). Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II. Program Pembangunan Rencana Lima Tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Program Rencana Lima Tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari Rencana Lima Tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta.

Usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini terkait dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya satu

tahun setelah berakhirnya KMB akan dibicarakan kembali, namun tidak dilaksanakan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Sejak tahun 1957 nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap; pertama, tahap pengambilalihan, penyitaan dan penguasaan atau sering disebut “di bawah pengawasan”. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia.

## **2) Sistem Ekonomi Liberal**

Sesudah pengakuan kedaulatan, Pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah penambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, Pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah perang Korea.

Namun sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat.

Disamping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemerintah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.

Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut diantaranya adalah melaksanakan industrialisasi, yang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing.

Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finex).

Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan Finek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut:

1. Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2. Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
4. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.

Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancang Negara pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang Rencana Program Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Namun karena berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal, RPLT sangat berat untuk dijalankan. Perekonomian Indonesia semakin terpuruk ketika ketegangan politik yang timbul tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam penumpasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintah, dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960.

#### **Akhir Masa Demokrasi Liberal di Indonesia.**

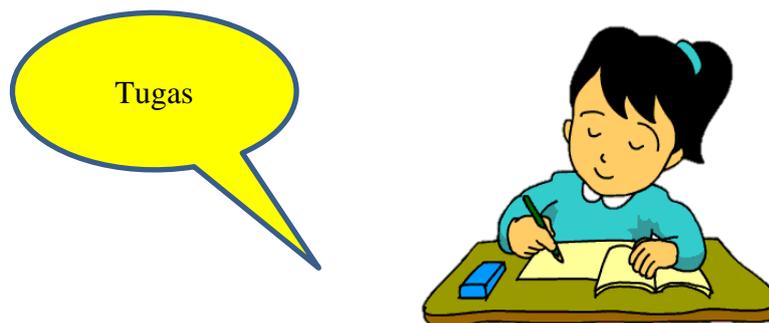
Kekacauan politik yang timbul karena pertikaian partai politik di Parlemen menyebabkan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga menghambat pembangunan. Hal ini diperparah dengan Dewan Konstituante yang mengalami kebuntuan dalam menyusun konstitusi baru, sehingga Negara Indonesia tidak memiliki pijakan hukum yang mantap. Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kegagalan konstituante disebabkan karena masing-masing partai hanya mengejar kepentingan partainya saja tanpa mengutamakan kepentingan negara dan Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Masalah utama yang dihadapi konstituante adalah tentang penetapan dasar negara. Terjadi tarik-ulur di antara golongan-golongan dalam konstituante. Sekelompok partai menghendaki agar Pancasila menjadi dasar negara, namun sekelompok partai lainnya menghendaki agama Islam sebagai dasar negara. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUDS 1950, maka secara otomatis sistem pemerintahan Demokrasi Liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulainya sistem Presidensial dengan Demokrasi Terpimpin ala Soekarno.

## C. Rangkuman

1. Periode antara tahun 1950-1959 dalam sejarah Indonesia disebut sebagai sistem Demokrasi Palementer yang memperlihatkan semangat belajar berdemokrasi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang dibangun mengalami kendala yang mengakibatkan jatuh bangun kabinet. Periode ini disebut oleh Wilopo, salah seorang Perdana Menteri di era tersebut (1952-1953) sebagai zaman pemerintahan partai-partai. Banyaknya partai-partai dianggap sebagai salah satu kendala yang mengakibatkan kabinet/ pemerintahan tidak berusia panjang dan silih berganti.
2. Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.
3. Pada era Demokrasi Liberal yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh banggunya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan terganggu.
4. Pada masa Demokrasi Liberal, Indonesia menjalankan pemilihan umum pertama yang diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan untuk memilih anggota Parlemen dan anggota Konstituante. Konstituante diberi tugas untuk membentuk UUD baru menggantikan UUD sementara. Sayangnya beban tugas yang diemban oleh Konstituante tidak dapat diselesaikan. Kondisi ini menambah kisruh situasi politik pada masa itu sehingga mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit tersebut membawa Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memasuki Demokrasi Terpimpin.

## D. Penugasan Mandiri



Untuk menguatkan pemahaman kalian terhadap materi yang telah dipelajari, bandingkan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan dengan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kalian dapat mencari referensi lain dari artikel, surat kabar, jurnal ataupun internet untuk menyelesaikan tugas ini.

## E. Latihan Soal

1. Perhatikan data berikut ini!
  - 1) Kabinet bersifat presidensial
  - 2) Kabinet bersifat parlementer
  - 3) Persaingan antarpolitical yang saling menjatuhkan
  - 4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah
  - 5) Pemerintah membangun partai tunggalBerdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh banggunya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...
  - A. 1, 2, dan 3
  - B. 2, 3, dan 4
  - C. 3, 4, dan 5
  - D. 1, 3, dan 5
  - E. 1, 2, dan 4
  
2. Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena ...
  - A. Kabinet yang berkuasa sangat lemah
  - B. Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi
  - C. Sering terjadi pergantian Kabinet
  - D. Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat
  - E. Tidak adanya Partai mayoritas
  
3. Setiap cabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah ...
  - A. Penyelesaian Konflik Angkatan darat
  - B. Pembangunan Lima Tahun
  - C. Pelaksanaan Pemilihan Umum
  - D. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
  - E. Pembentukan Partai Politik
  
4. Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam disintegrasi bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal pelaksanaan demokrasi liberal adalah ...
  - A. Pemberontakan PRRI atau PERMESTA
  - B. Pemberontakan di Irian Barat
  - C. Krisis keuangan di berbagai daerah
  - D. Munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
  - E. Intervensi Parlemen terhadap TNI
  
5. Sistem multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistem Demokrasi ...
  - A. Komunis
  - B. Pancasila
  - C. Sosialis
  - D. Terpimpin
  - E. Liberal.

6. Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun karena kabinet bersandar pada kekuatan dan perimbangan partai politik. Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut cabinet ...
- Parlementer
  - Zaken Kbinet
  - Koalisi
  - Karya
  - Partai
7. Perhatikan pernyataan dibawah ini :
- Menggiatkan usaha keamanan dan Ketentraman
  - Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
  - Mempercepat persiapan Pemilihan Umum
  - Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
  - Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar ( KMB )
  - Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
- Pernyataan diatas yang merupakan Program kerja Kabinet Sukiman adalah nomor ...
- 1) 3) dan 4)
  - 1) 2) dan 5)
  - 1) 2) dan 6)
  - 2) 3) dan 4)
  - 3) 4) dan 5)
8. Setelah kabinet Sukiman Jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Masalah yang cukup berat yang dihadapi oleh Wilopo adalah ....
- Pertikaian antara presiden dan perdana menteri
  - Konflik Indonesia – Malaysia
  - Terjadinya DI/ TII Jawa Barat
  - Peristiwa 17 Oktober 1952
  - Penandatanganan MSA
9. Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (*Mutual Security Act*). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah....
- Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
  - Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
  - Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
  - Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
  - Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan penandatanganan MSA
10. Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa pemerintahan Kabinet ...
- Ir Djuanda
  - Ali sastroamijoyo

- C. Sukiman
  - D. Natsir
  - E. Wilopo
11. Pada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal "Deklarasi Djuanda". Isi pokok deklarasi tersebut adalah...
- A. Persatuan partai-partai politik
  - B. Deklarasi partai pemenang pemilu
  - C. Deklarasi keamanan Indonesia
  - D. Deklarasi Berdikari
  - E. Pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral RI
12. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
- A. masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
  - B. pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
  - C. penyelesaian status wilayah Irian Barat
  - D. penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
  - E. pembentukan Uni Indonesia Belanda
13. Pemilu I Tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota Konstituante. Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 bertugas untuk ...
- A. Menyusun Garis-garis Besar haluan Negara ( GBHN )
  - B. Menyusun Undang-Undang Baru
  - C. Mengkoreksi peraturan yang dikeluarkan pemerintah
  - D. Menyelamatkan sistim Demokrasi Indonesia
  - E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
14. Pelaksanaan Pemilu 1 Tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Empat partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama 1955 adalah...
- A. PSH, PNI, NU, dan PKI
  - B. PPTI, NU, PKI, dan Partai Buruh
  - C. Masyumi, PNI, NU, dan PKI
  - D. PNI, PBSI, Parkindo, dan PSII
  - E. NU, Masyumi, PSI, dan Partai Buruh
15. Pada masa demokrasi liberal kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil. Penyebab ekonomi tersendat-sendat pada masa Demokrasi Liberal adalah..., kecuali,
- A. Keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatisme daerah
  - B. Belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli
  - C. Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar
  - D. Kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana, program baru mulai dirancang
  - E. Diandalkannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan

16. Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah ...
- A. Adanya Sabotase dari kaki tangan Belanda
  - B. Penyuluhan pemerintah kurang efektif
  - C. Subsidi pemerintah sangat kurang
  - D. Golongan Pribumi merasa rendah diri
  - E. Golongan Pribumi belum berpengalaman
17. Gerakan Benteng adalah sistem perekonomian yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Pembangunan Ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara ...
- A. Menasionalisasi Bank-bank milik pemerintah Belanda
  - B. Mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional
  - C. Menasionalisasi perusahaan – perusahaan Asing
  - D. Mendirikan perusahaan – Perusahaan Negara
  - E. Meningkatkan ekspor nonmigas
18. Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada pemerintah Belanda sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Indonesiapun membatalkan seluruh Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar secara sepihak. Pembatalan segala Keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa Kerja Kabinet ...
- A. Burhanudin Harahap
  - B. Moh. Hatta
  - C. Ali Sastroamijoyo II
  - D. Wilopo
  - E. Moh. Natsir
19. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
- A. masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
  - B. pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
  - C. penyelesaian status wilayah Irian Barat
  - D. penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
  - E. pembentukan Uni Indonesia Belanda
20. Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan Domisioner dan selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain...
- A. Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda
  - B. Indonesia diterima sebagai anggota PBB
  - C. Mengadakan pemilihan umum
  - D. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
  - E. Deklarasi Djuanda

## Kunci Jawaban dan Pembahasan

No.	Kunci Jawaban	Pembahasan
1.	B	Penyebab jatuh banggunya kabinet selama masa Demokrasi Liberal Kabinet bersifat parlementer, sering terjadi persaingan antarpartai politik yang saling menjatuhkan dan Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah
2.	C	Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena sering terjadi pergantian Kabinet.
3.	D	Setiap cabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
4.	D	Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam disintegrasi bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal pelaksanaan demokrasi liberal adalah munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
5.	E	Sistim Multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistim Demokrasi Liberal.
6.	C	Program kerja Kabinet natsir antara lain menggiatkan usaha keamanan dan Ketentraman, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
7.	A	Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun karena cabinet bersandar pada kekuatan dan perimbangan partai politik. Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut cabinet Parlementer
8.	D	Setelah kabinet Sukiman Jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Masalah yang cukup berat yang dihadapi oleh Wilopo adalah Peristiwa 17 Oktober 1952
9.	D	Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA ( <i>Mutual Security Act</i> ). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik

No.	Kunci Jawaban	Pembahasan
		luar negeri bebas aktif Indonesia adalah penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
10.	E	Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo
11	E	ada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal "Deklarasi Djuanda". Isi pokok deklarasi tersebut adalah pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral RI
12	C	Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah penyelesaian status wilayah Irian Barat.
13	B	Pemilu I Tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota Konstituante. Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 bertugas untuk menyusun Undang-Undang Baru
14	C	Pelaksanaan Pemilu 1 Tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Empat partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama 1955 adalah Masyumi, PNI, NU, dan PKI.
15	C	Pada masa demokrasi liberal kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil. Pelaksanaan ekonomi tersendat-sendat pada masa Demokrasi Liberal disebabkan oleh keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatisme daerah, Indonesia belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli, kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana, program baru mulai dirancang, hanya mengandalkan satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan
16	E	Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah golongan Pribumi belum berpengalaman
17	B	Gerakan Benteng adalah sistem perekonomian yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Pembangunan Ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional .
18	A	Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada pemerintah Belanda sesuai dengan hasil

No.	Kunci Jawaban	Pembahasan
		keputusan Konferensi Meja Bundar. Indonesiapun membatalkan seluruh Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar secara sepihak. Pembatalan segala Keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa Kerja Kabinet Burhanudin Harahap
19	C	Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah. penyelesaian status wilayah Irian Barat.
20	C	Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan Domisioner dan selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap antara mengadakan pemilihan umum.

## F. Penilaian Diri

Berilah tanda centang (√) pada format di bawah ini sesuai dengan jawaban kalian!

No.	PERNYATAAN	PENILAIAN	
		Ya	Tidak
1	Saya sangat senang belajar sejarah mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal		
2	Saya mampu menjelaskan Kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal		
3.	Saya mampu menjelaskan kondisi kehidupan politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
4.	Saya mampu menjelaskan sistem pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal		
5.	Saya mampu menganalisis mengapa pada masa Demokrasi Liberal sering terjadi jatuh bangun kabinet .		
6.	Saya mampu menjelaskan system kepartaian pada masa Demokrasi Liberal		
7.	Saya mampu menjelaskan pelaksanaan Pemilu I Tahun 1955		
8.	Saya mampu menganalisis mengapa pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia berakhir		
9	Saya mampu menjelaskan Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Demokrasi Liberal		
10.	Saya mampu menjelaskan kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi		
11.	Saya mampu menguraikan langkah langkah atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi dan menata perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan		
12	Saya dapat menyelesaikan latihan/ tugas dengan semangat		
13	Banyak hal baru yang saya dapatkan dari mempelajari modul yang membahas mengenai perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal		
14	Saya dapat mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah Indonesia pada masa awal kemerdekaan dalam menata kehidupan politik dan ekonomi Indonesia.		

Bila ada jawaban "Tidak", maka segera lakukan review pembelajaran, terutama pada bagian yang masih "Tidak".

Bila semua jawaban "Ya", maka Kamu dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya.

## EVALUASI

1. Kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan belum stabil. Dibawah ini adalah penyebab ketidakstabilan kehidupan politik pada masa awal kemerdekaan, kecuali...
  - A. Pertentangan antar partai
  - B. Terjadinya bentrokan antar etnis
  - C. Gangguan dari Belanda yang ingin berkuasa kembali
  - D. Munculnya kesulitan ekonomi dan keuangan
  - E. Munculnya gangguan keamanan dalam negeri
2. Pada tanggal 3 November 1945 diterbitkan maklumat pemerintah mengenai pendirian partai politik. Sebelum adanya maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, Indonesia merencanakan satu partai tunggal yaitu...
  - A. Masyumi
  - B. PKI
  - C. PNI
  - D. NU
  - E. PSI
3. Terbentuknya Kabinet Sjahrir tanggal 14 November 1945 merupakan suatu bentuk penyelewengan pertama pemerintah RI terhadap UUD 1945. Sejak tanggal 14 November 1945 Indonesia menganut sistem pemerintahan...
  - A. Parlementer
  - B. Presidensial
  - C. Liberalisme
  - D. Terpimpin
  - E. Aristokrasi
4. Berdirinya partai politik telah mendorong Sutan Sjahrir yang berasal dari partai Sosialis untuk menghidupkan bentuk pemerintahan dengan cabinet parlementer. Hal ini dilakukan dengan alasan...
  - A. agar perjuangan bangsa Indonesia mendapat dukungan dari negara negara barat
  - B. sesuai dengan perkembangan ideology di Indonesia
  - C. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
  - D. mengikuti arus perpolitikan Indonesia yang mulai berkembang
  - E. permintaan dari Presiden Soekarno.
5. Pada masa awal kemerdekaan, system pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan system pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah...
  - A. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia
  - B. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis.
  - C. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan
  - D. Mempermudah perundingan dengan Belanda
  - E. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar

6. Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibu kota Jakarta semakin kacau. Pemerintah terus didesak dan diteror oleh pemerintah asing. Pada saat ibukota dipindahkan ke Yogyakarta, Perdana Menteri Sjahrir masih berkedudukan di Jakarta untuk...
  - A. menghadapi terror Belanda
  - B. menjalankan roda pemerintahan dari pusat
  - C. mengadakan hubungan dengan luar negeri
  - D. menghimpun kekuatan menghadapi Belanda
  - E. menciptakan pemerintahan tandingan
  
7. Kondisi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan tidak stabil. Keadaan ekonomi pada awal kemerdekaan mengalami kekacauan, salah satu factor penyebab antara lain...
  - A. Rakyat Indonesia hanya mengandalkan pendapatan dalam pertanian .
  - B. Banyaknya investor asing yang mengintervensi perekonomian Indonesia
  - C. Adanya Blokade ekonomi oleh Belanda
  - D. Rendahnya sumber daya manusia Indonesia dalam perekonomian
  - E. Sering terjadi konflik horizontal dalam negeri Indonesia
  
8. Kondisi kehidupan ekonomi pada masa awal kemerdekaan tidak stabil karena terjadi inflasi. Terjadinya inflasi pada masa awal kemerdekaan disebabkan oleh...
  - A. Indonesia belum memiliki mata uang yang sah
  - B. Peredaran mata uang Jepang yang belum terkendali
  - C. Tentara Jepang masih menguasai sebagian besar sector ekonomi
  - D. Terjadinya pertempuran pertempuran diberbagai daerah.
  - E. Munculnya perusahaan perusahaan asing milik Belanda
  
9. Indonesia harus dapat mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi pada masa awal kemerdekaan. Salah satu upaya bangsa Indonesia dalam melakukan perbaikan ekonomi pada awal kemerdekaan dilakukan dengan cara ...
  - A. Menaikkan pajak dan bea Cukai
  - B. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan untuk diekspor
  - C. Mengisi kas pemerintah yang kosong
  - D. Mengedarkan uang secara besar besaran.
  - E. Mengeluarkan mata uang sendiri (ORI)
  
10. Salah satu penyebab kacanya kondisi perekonomian Indonesia pada masa awal kemerdekaan karena kas negara kosong. Upaya pemerintah Republik Indonesia mengisi kas negara yang kosong pada awal Kemerdekaan adalah ...
  - A. Menyenggarakan pinjaman Nasional
  - B. Menasionalisasi De Javasche Bank
  - C. Membuat kebijakan Gunting Syafruddin
  - D. Mendevaluasi mata uang rupiah
  - E. Sistim ekonomi Gerakan Benteng
  
11. Perhatikan data berikut ini!
  - 1) Kabinet bersifat presidensial
  - 2) Kabinet bersifat parlementer

- 3) Persaingan antarpolitis yang saling menjatuhkan
- 4) Koalisi partai politik yang dibangun gampang pecah
- 5) Pemerintah membangun partai tunggal

Berdasarkan pernyataan di atas, penyebab jatuh bangunnya kabinet selama masa Demokrasi Liberal (1950-1959) berada pada pernyataan nomor...

- A. 1, 2, dan 3
  - B. 2, 3, dan 4
  - C. 3, 4, dan 5
  - D. 1, 3, dan 5
  - E. 1, 2, dan 4
12. Pada masa demokrasi liberal keadaan pemerintahan tidak stabil. Hal ini disebabkan karena ...
- A. Kabinet yang berkuasa sangat lemah
  - B. Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi
  - C. Sering terjadi pergantian Kabinet
  - D. Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat
  - E. Tidak adanya Partai mayoritas
13. Setiap kabinet yang berkuasa pada masa demokrasi liberal mempunyai program. Masalah yang selalu menjadi program setiap Kabinet pada masa Demokrasi Liberal adalah ...
- A. Penyelesaian Konflik Angkatan darat
  - B. Pembangunan Lima Tahun
  - C. Pelaksanaan Pemilihan Umum
  - D. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia
  - E. Pembentukan Partai Politik
14. Pada masa demokrasi liberal terjadi gangguan keamanan yang mengancam disintegrasi bangsa. Contoh gangguan keamanan yang terjadi di Indonesia pada awal pelaksanaan demokrasi liberal adalah ...
- A. Pemberontakan PRRI atau PERMESTA
  - B. Pemberontakan di Irian Barat
  - C. Krisis keuangan di berbagai daerah
  - D. Munculnya gerakan separatisme diberbagai daerah
  - E. Intervensi Parlemen terhadap TNI
15. Sistem multipartai yang merupakan dampak Maklumat Pemerintah 3 November 1945 mendorong bangsa Indonesia menerapkan sistem Demokrasi ...
- A. Komunis
  - B. Pancasila
  - C. Sosialis
  - D. Terpimpin
  - E. Liberal
16. Perhatikan pernyataan dibawah ini :
- 1). Menggiatkan usaha keamanan dan Ketentraman
  - 2). Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan

- 3). Mempercepat persiapan Pemilihan Umum
- 4). Menjalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
- 5). Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar ( KMB )
- 6). Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pernyataan diatas yang merupakan Program kerja Kabinet Natsir adalah nomor ...

- A. 1) 3) dan 4)
  - B. 1) 2) dan 5)
  - C. 1) 2) dan 6)
  - D. 2) 3) dan 4)
  - E. 3) 4) dan 5)
17. Kabinet yang terbentuk pada masa demokrasi liberal sering jatuh bangun karena cabinet bersandar pada kekuatan dan perimbangan partai politik. Kabinet yang bersandar pada perimbangan kekuatan partai-partai politik disebut cabinet ....
- A. Parlementer
  - B. Zaken Kbinet
  - C. Koalisi
  - D. Karya
  - E. Partai
18. Setelah kabinet Sukiman Jatuh digantikan oleh kabinet Wilopo. Masalah yang cukup berat yang dihadapi oleh Wilopo adalah ....
- A. Pertikaian antara presiden dan perdana menteri
  - B. Konflik Indonesia – Malaysia
  - C. Terjadinya DI/ TII Jawa Barat
  - D. Peristiwa 17 Oktober 1952
  - E. Penandatanganan MSA
19. Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (*Mutual Security Act*). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah....
- A. Penandatanganan MSA merupakan wujud dari penerapan politik bebas aktif
  - B. Dengan penandatanganan tersebut Indonesia dianggap condong ke blok timur
  - C. Politik bebas aktif Indonesia tidak dapat sejalan dengan bantuan ekonomi MSA
  - D. Penandatanganan MSA dipandang telah melanggar politik bebas aktif Indonesia
  - E. Sukiman dianggap kurang tegas dalam menerapkan politik bebas aktif dengan penandatanganan MSA
20. Kabinet yang jatuh berkaitan dengan peristiwa Tanjung Morawa terjadi pada masa pemerintahan Kabinet ...
- A. Ir Djuanda
  - B. Ali sastroamijoyo
  - C. Sukiman
  - D. Natsir
  - E. Wilopo

21. Pada tanggal 13 Desember 1957, P.M. Djuanda menyatakan deklarasi yang dikenal "Deklarasi Djuanda". Isi pokok deklarasi tersebut adalah...
  - A. Persatuan partai-partai politik
  - B. Deklarasi partai pemenang pemilu
  - C. Deklarasi keamanan Indonesia
  - D. Deklarasi Berdikari
  - E. Pernyataan bahwa laut antara pulau-pulau di seluruh perairan Indonesia merupakan wilayah integral RI
  
22. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah....
  - A. masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
  - B. pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
  - C. penyelesaian status wilayah Irian Barat
  - D. penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
  - E. pembentukan Uni Indonesia Belanda
  
23. Pemilu I Tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota Konstituante. Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955 bertugas untuk ...
  - A. Menyusun Garis-garis Besar haluan Negara ( GBHN )
  - B. Menyusun Undang-Undang Baru
  - C. Mengkoreksi peraturan yang dikeluarkan pemerintah
  - D. Menyelamatkan sistim Demokrasi Indonesia
  - E. Memilih Presiden dan Wakil Presiden
  
24. Pelaksanaan Pemilu 1 Tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Empat partai pemenang dalam pelaksanaan pemilu pertama 1955 adalah...
  - A. PSH, PNI, NU, dan PKI
  - B. PPTI, NU, PKI, dan Partai Buruh
  - C. Masyumi, PNI, NU, dan PKI
  - D. PNI, PBSI, Parkindo, dan PSII
  - E. NU, Masyumi, PSI, dan Partai Buruh
  
25. Pada masa demokrasi liberal kondisi perekonomian Indonesia tidak stabil. Penyebab ekonomi tersendat-sendat pada masa Demokrasi Liberal adalah..., kecuali,
  - A. Keamanan dalam negeri tidak menguntungkan, terjadinya pemberontakan, dan separatisme daerah
  - B. Belum berpengalaman dalam menata ekonomi yang baik, belum memiliki tenaga ahli
  - C. Dana bantuan dari luar negeri melalui IMF bunganya sangat besar
  - D. Kabinet terlalu sering berganti, programnya belum terlaksana, program baru mulai dirancang
  - E. Diandalkannya satu jenis impor terutama pertanian dan perkebunan

26. Sistem ekonomi Ali Baba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa Demokrasi Liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan Program Ali Baba adalah ...
- Adanya Sabotase dari kaki tangan Belanda
  - Penyuluhan pemerintah kurang efektif
  - Subsidi pemerintah sangat kurang
  - Golongan Pribumi merasa rendah diri
  - Golongan Pribumi belum berpengalaman
27. Gerakan Benteng adalah sistem perekonomian yang dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Pembangunan Ekonomi baru berdasarkan gagasan Gerakan Benteng dilakukan dengan cara ...
- Menasionalisasi Bank-bank milik pemerintah Belanda
  - Mengubah struktur ekonomi Kolonial menjadi Ekonomi Nasional .
  - Menasionalisasi perusahaan – perusahaan Asing
  - Mendirikan perusahaan – Perusahaan Negara
  - Meningkatkan ekspor nonmigas
28. Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada pemerintah Belanda sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Indonesiapun membatalkan seluruh Isi Keputusan Konferensi Meja Bundar secara sepihak. Pembatalan segala Keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa Kerja Kabinet ...
- Burhanudin Harahap
  - Moh. Hatta
  - Ali Sastroamijoyo II
  - Wilopo
  - Moh. Natsir
29. Salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik Indonesia dan Belanda adalah melalui meja perundingan KMB. Beberapa hasil KMB yang tidak dapat direalisasikan oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan adalah...
- masalah penarikan pasukan dari wilayah RIS termasuk di dalamnya KNIL
  - pembayaran hutang dan biaya perang Belanda- Indonesia
  - penyelesaian status wilayah Irian Barat
  - penarikan kapal Belanda ukuran kecil (korfet) dari wilayah perairan RIS
  - pembentukan Uni Indonesia Belanda
30. Setelah Kabinet Ali Sastriamidjojo 1 dinyatakan Domisioner dan selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanudin Harahap. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain...
- Pembatalan utang Indonesia kepada Belanda
  - Indonesia diterima sebagai anggota PBB
  - Mengadakan pemilihan umum
  - Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika
  - Deklarasi Djuanda

## Kunci Jawaban

No.	Kunci Jawaban
1.	B
2.	C
3.	A
4.	D
5.	E
6.	C
7.	C
8.	B
9.	E
10.	A
11.	B
12.	C
13.	D
14.	D
15.	E

No.	Kunci Jawaban
16.	C
17.	A
18.	D
19.	D
20.	E
21.	E
22.	C
23.	B
24.	C
25.	C
26.	E
27.	B
28.	A
29.	C
30.	C

## DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2015, Sejarah Indonesia Kelas XII SMA/MA/SMK/MAK, PN: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/12/183000569/kondisi-awal-indonesia-merdeka> (diakses tanggal 8 September 2020)

<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/indonesia-pada-awal-kemerdekaan-5283/> (diakses tanggal 8 September 2020)

<https://thecrossandthecontroller.com/politik-indonesia-pada-masa-awal-kemerdekaan/> (diakses tanggal 8 September 2020)

<https://thecrossandthecontroller.com/politik-indonesia-pada-masa-awal-kemerdekaan/> (diakses tanggal 8 September 2020)

<https://zakiyan08.wordpress.com/2012/11/06/kondisi-ekonomi-indonesia-awal-kemerdekaan/> (diakses tanggal 8 September 2020)